

# KERANGKA KERJA PERJANJIAN CMATS (*TREATY ON CERTAIN MARITIME ARRANGEMENTS IN THE TIMOR SEA*) DALAM PENGELOLAAN PROYEK *GREATER SUNRISE* TIMOR LESTE DAN AUSTRALIA TAHUN 2006-2010

**Fiqih Dwimurti Kampau<sup>1</sup>**  
fiqihkampau@yahoo.com  
Indra Pahlawan, S. IP., M.Si.

## **Abstract**

*This research explains the framework of Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (CMATS) to manage the Greater Sunrise project between Timor Leste and Australia from 2006 to 2010. Maritime boundaries issues between Timor Leste and Australia have been ongoing since three decades ago. Timor Leste since independence in 2002 until today, has reached three agreements with Australia, those are Timor Sea Treaty, Sunrise International Unitisation Agreement and CMATS Treaty. Those three agreements, especially CMATS Treaty, define the cooperative management of oil and gas resources in the Timor Sea, but it does not solve the basic problems of the maritime boundary claims of the two countries.*

**Keywords:** *Maritime boundary, Greater Sunrise project, Political pressure, CMATS Treaty*

## **Pendahuluan**

Timor Leste merupakan negara berdaulat yang relatif berusia muda karena baru merdeka pada 20 Mei 2002. Timor Leste merdeka melalui perjuangan yang panjang dari dua rezim yang menguasainya. Australia merupakan negara yang berkontribusi terhadap perjuangan rakyat Timor Leste untuk merdeka mulai dari proses referendum pada tahun 1999 hingga menuju kemerdekaan pada tahun 2002. Hubungan bilateral diantara keduanya bahkan sudah berlangsung ketika Timor Leste masih berada di bawah rezim Portugal dan pendudukan Indonesia.

Sebagai negara yang baru hadir dalam perpolitikan internasional, Timor Leste harus melakukan penataan di berbagai bidang kehidupan nasionalnya. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh Timor Leste, terutama mengenai perbatasan Laut Timor yang diperebutkan dengan Australia karena adanya daerah yang disebut Celah Timor. *Greater Sunrise* merupakan ladang minyak dan gas alam yang terbesar di kawasan Celah Timor. Teori dua landas benua Australia merupakan dasar awal dari klaim Australia terhadap ladang *Greater Sunrise* di Laut Timor yang secara geografis lebih berdekatan dengan negara Timor Leste. Australia merasa klaim atas teritorialnya yang sah sesuai dengan konvensi Genewa tentang hukum laut 1958, sementara Timor Leste merasa lebih berhak dengan konvensi PBB mengenai hukum laut UNCLOS 1982.<sup>2</sup>

Secara geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi, *Greater Sunrise* merupakan salah satu ladang minyak yang dapat dijadikan sumber energi bagi Australia untuk mendukung kepentingan nasionalnya. *Greater Sunrise* memiliki kandungan gas 8,4 Tcf (*trillion cubic feet*) dan 295 juta barel kondensat, dengan estimasi pendapatan sebesar US\$ 36 miliar dari tahun 2008-2050.<sup>3</sup> Australia telah lama berupaya untuk memperluas aksesnya di *Greater Sunrise* sejak awal ditemukannya ladang tersebut pada tahun 1974. Perusahaan minyak Woodside (Australia) telah mengeksplorasi

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UR, NIM 0901113499

<sup>2</sup>Raimundo de FátimaAlvesCorreia. "Resume skripsi Upaya Timor Leste dalam Menyelesaikan Batas Wilayah Laut dengan Australia". 2011.

< repository.upnyk.ac.id/1405/1/RESUME\_SKRIPSI.pdf >. [diakses 5 Desember 2012]

<sup>3</sup>*National Interest Analysis: Treaty between the Government of Australia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea*, done at Sydney on 12 January 2006, hal. 3.

ladang *Greater Sunrise* sejak sebelum pendudukan Indonesia di Timor Leste pada tahun 1975. Salah satu upaya Australia untuk memperluas akses tersebut adalah dengan menanamkan pengaruh politiknya di Timor Leste secara intensif sejak pra referendum (pertengahan 1999) hingga pasca referendum. Australia merupakan negara yang membantu perjuangan rakyat Timor Leste untuk merdeka hingga menuju kemerdekaan pada tahun 2002.

Keterlibatan negara Australia terhadap kemerdekaan Timor Leste secara tidak langsung memberikan posisi politik tersendiri bagi Australia di negara tersebut. Posisi ini semakin dikukuhkan dengan bantuan ekonomi dari Australia terhadap pembangunan Timor Leste yang masih perlu melakukan penataan di berbagai bidang. Australia menggunakan kesempatan tersebut untuk mencapai tujuannya dalam memperluas akses terhadap kandungan minyak dan gas ladang *Greater Sunrise*. Australia menolak untuk memutuskan permasalahan batas laut sesuai dengan hukum atau melalui penengahan oleh pihak ketiga yang tidak memihak dan mendesakkan perundingan bilateral.

Perundingan Timor Leste dan Australia sejak tahun 2002 telah menghasilkan tiga kesepakatan pengelolaan sumber minyak dan gas di Laut Timor, yaitu Perjanjian Laut Timor (2002), Kesepakatan Penyatuan Internasional *Sunrise* (2003) dan Perjanjian CMATS (2006). Tiga kesepakatan tersebut, terutama Perjanjian CMATS, menetapkan kerjasama dalam pengelolaan sumber minyak dan gas di Laut Timor, namun tidak menyelesaikan permasalahan dasar mengenai batas-batas laut antara kedua negara. Perjanjian CMATS dihasilkan dari suatu proses diplomatis yang berlangsung lebih dari 30 tahun yang memperpanjang ketentuan bahwa penyelesaian setiap sengketa perjanjian akan dilakukan melalui perundingan bilateral dengan menunda memutuskan negara mana yang memiliki wilayah laut dan dasar laut yang mana hingga 40-50 tahun ke depan.<sup>4</sup> Perjanjian CMATS merupakan suatu kerangka kerja yang mengatur mekanisme pelaksanaan produksi, pembagian hasil ekstraksi (50:50) hingga opsi-opsi pembangunan pipa proyek *Greater Sunrise* antara Australia dan Timor Leste.

Penelitian ini menggunakan tingkat analisa negara bangsa yang berkonsentrasi pada apa yang dilakukan oleh negara serta bagaimana negara memutuskan untuk mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan nasional (*national interest*).<sup>5</sup> Tingkat analisa ini mempelajari apa yang akan dilakukan negara-negara berdasarkan pandangan bahwa banyak dari peristiwa politik dunia berputar sekitar interaksi antar pemerintah, dua negara atau lebih mencoba mengukur alasan rasional di belakang tindakan negara lain dan mengantisipasi gerakan berikutnya. Penulis menggunakan teori saling ketergantungan (*interdependence*) menurut Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi untuk menganalisa hubungan kerjasama Timor Leste dan Australia dalam konteks Perjanjian CMATS.

Kondisi interdependensi pada umumnya berkaitan dengan kekuasaan dan ketergantungan, yakni ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lain yang lebih dominan. Interdependensi tidak selalu diartikan sebagai sebuah keadilan. Interdependensi merupakan sumber *power* bagi kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Interdependensi tidak hanya melibatkan negara sebagai aktor utamanya, tetapi juga dapat terjadi pada aktor-aktor non negara serta *multinational corporations*.<sup>6</sup> Hubungan kerjasama antara Australia dan Timor Leste tersebut berpijak pada *power* dan kemampuan diplomasi, yang terutama berkaitan dengan kondisi interdependensi yang asimetris. Kondisi interdependensi mengarah pada suatu hubungan yang timbal balik, namun dalam kenyataannya hubungan yang simetris tersebut jarang terjadi.

## Hasil dan Pembahasan

---

<sup>4</sup>Buletin La'o Hamutuk, "Kronologi Negosiasi laut Timor", *Perjanjian CMATS*, Vol.7, No. 1, April 2006, hal. 1.

<sup>5</sup>Mohar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1990), hal. 25.

<sup>6</sup>Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory, Realism, Pluralism, Globalis*, (New York: MacMillan Publishing Company, 1990), hal. 65.

Keinginan Australia untuk menguasai pengelolaan sumber daya minyak dan gas di Celah Timor merupakan salah satu bentuk implementasi dari prioritas kebijakan luar negeri Australia. Dalam pencapaian tujuan kebijakan luar negerinya tersebut, Australia menerapkan unsur pengaruh (*influence*) melalui penggunaan tekanan politik terhadap negara Timor Leste yang memiliki arti strategis bagi keamanan dan kepentingan ekonominya. Hal ini berkaitan dengan tercapainya Perjanjian CMATS (*Treaty on Certain Maritime Arrangements in Timor Sea*) dalam pengelolaan proyek *Greater Sunrise* di Laut Timor antara Australia dan Timor Leste pada tahun 2006.

Perjanjian CMATS diratifikasi oleh Timor Leste bersamaan dengan Perjanjian Penyatuan Internasional *Sunrise* pada 20 Februari 2007 dengan proses yang tertutup untuk publik. Australia meratifikasi Perjanjian CMATS pada 22 Februari 2007 tanpa menunggu persetujuan parlemen mengenai periode ratifikasi dengan pengecualian kepentingan nasional agar perjanjian ini dapat diberlakukan pada hari berikutnya.<sup>7</sup> Penjelasan kepentingan nasional Australia tersebut adalah untuk menciptakan stabilitas legal untuk eksplorasi dan eksploitasi kekayaan minyak di Laut Timor antara Timor Leste dan Australia tanpa melanggar klaim atas batas laut.

### **Keuntungan Ekonomi Politik Australia Terhadap Celah Timor**

Australia sebagai kekuatan menengah (*medium power*) di antara negara-negara besar merupakan *major power* di antara negara-negara kawasan Asia Pasifik. Australia memiliki peranan yang penting dalam percaturan ekonomi politik internasional, bahkan Australia sudah menganggap kawasan ini sebagai bagian dari wilayah pengaruhnya (*sphere of influence*). Australia selama ini telah berupaya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi politik internasional kawasan dalam kebijakan luar negerinya dengan dua cara.<sup>8</sup>

**Pertama**, mempertahankan suatu lingkungan keamanan positif dan strategis di kawasan sendiri yang berarti menjaga integritas fisik dan kedaulatan. Diplomasi Australia yang paling utama adalah mempertahankan suatu lingkungan keamanan dan strategis yang positif di kawasannya, termasuk mengamankan sumber daya yang penting untuk menunjang keberlangsungan pembangunan ekonominya. Khusus untuk kawasan Asia Tenggara, Australia menerapkan kebijakan *comprehensive engagement*, yaitu keinginan untuk membangun keterhubungan dengan Asia Tenggara yang berskala besar. Dalam konteks ini, Australia menerapkan pendekatan multi dimensional terhadap negara-negara di kawasan tersebut.

**Kedua**, mencari kerjasama perdagangan, investasi dan ekonomi. Prioritas kedua ini ditujukan agar ekonomi Australia dapat tetap bertahan dan makmur pada abad-abad mendatang. Dalam konteks domestik, Australia berupaya untuk melakukan deregulasi ekonomi keuangan dan perburuhan, sedangkan dalam konteks regional berupaya untuk mengintegrasikan ekonominya dengan kawasan Asia Pasifik. Australia berpartisipasi dalam keamanan global dan berlaku sebagai warga internasional yang baik.

Isu Timor Timur telah sejak lama menjadi bagian dari politik dalam negeri Australia. Kepentingan politik Australia yang paling kentara terhadap Timor Timur pertama kalinya adalah menghindari melebarnya konflik di Timor Timur pada tahun 1970-an yang menjadi ancaman bagi wilayah Australia. Australia menghendaki kondisi Timor Timur stabil sehingga hubungan politik RI-Australia tidak terganggu, sehingga pada waktu itu Australia seperti memihak dengan Indonesia dengan mengakui batas-batas wilayah di daerah Timor Timur.<sup>9</sup> Puncak pengakuan itu adalah disepakatinya pembagian Celah Timor berdasarkan ketentuan yang disepakati kedua pihak oleh Menlu Ali Alatas dan Menlu Gareth Evans.

Secara eksplisit, pengaturan batas laut di wilayah yang kaya akan kandungan minyak menjadikan Australia sebagai negara pertama yang mengakui eksistensi Indonesia atas Timor

<sup>7</sup>Buletin La'o Hamutuk, "Penjelasan Terhadap Kepentingan Nasional Australia", *Penyaringan PNTL Untuk Kembali Bertugas*, Vol.8, No.2, Juni 2007, hal. 11.

<sup>8</sup>Aleksius Jemadu, "Tinjauan Historis Kebijakan Keamanan Australia", *Kebijakan Politik dan Keamanan Australia di Kawasan Asia Pasifik*, Vol. 10, No.2, November 2006, hal. 149.

<sup>9</sup>Hilman Adil, *Hubungan Australia dengan Indonesia 1945-1962*, (Jakarta: Djambatan, 1993), hal. 6-8.

Timor. Pergantian pemerintahan Australia dengan dilantiknya Perdana Menteri John Howard mengubah sikap Australia secara total berkaitan dengan kebijakannya atas Timor Timur untuk jangka panjang harus merdeka. Hal ini didasarkan pada otonomi luas yang harus diberikan kepada Timor Timur sebelum merdeka penuh.<sup>10</sup> Sikap Australia dilandasi oleh kepentingan jangka panjang terhadap Timor Timur dan Indonesia.

Kepentingan Australia terhadap Indonesia ditunjukkan melalui unjuk kekuatan politik atas Timor Timur. Intervensi militer Australia ke Timor Timur menunjukkan bahwa Australia memiliki kemampuan diplomatik yang berskala global. Australia yang melakukan pendekatan kepada Amerika Serikat dan Eropa menyokong tujuannya untuk memasukkan Timor Timur di bawah kekuasaan PBB. Sikap Australia paling akhir ini dapat dilihat dari Doktrin Howard sebagai pedoman politik luar negeri Australia.

Doktrin Howard merupakan kebijakan politik regional yang bersandar pada pandangan politik internasional Australia yang ingin menjadi wakil atau *deputy* penjaga keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Pasifik dengan Amerika Serikat sebagai ketua.<sup>11</sup> Inti dan dasar pemikiran Doktrin Howard ini mengundang berbagai reaksi dari kawasan Asia dan di Australia sendiri. Inti dan dasar pemikiran tersebut antara lain:

- a) Australia adalah bangsa Eropa yang memiliki karakteristik tertentu dan menempati kedudukan khusus di kawasan Asia. Hal ini merupakan nilai yang menurut Australia harus dipertahankan dan dipromosikan di kawasan Asia.
- b) Untuk menjamin kehidupan nilai yang menjadi pedoman benar/ salah dalam kebijakan dan perilaku kebijakan luar negerinya di kawasan ini, Howard menunjuk Australia sebagai wakil Amerika Serikat dalam peranannya sebagai polisi internasional di kawasan Asia.

Sikap Australia tersebut berkaitan dengan keinginan untuk menguasai sumber minyak di perbatasan Laut Timor. Akses terhadap energi ini merupakan pendorong utama Australia untuk melakukan intervensi dalam menangani gejolak di Timor Timur pasca referendum. Kandungan minyak yang besar di perbatasan Timor Timur dan Australia merupakan aset penting bagi perkembangan ekonomi masa depan Australia. Ladang Bayu-Undan misalnya, ditaksir memiliki cadangan minyak 400 juta barel, 3 Tcf gas alam dan 370 juta barel cairan kondensat dan LPG.<sup>12</sup>

Keinginan Australia untuk menguasai pengelolaan sumber daya minyak dan gas di Celah Timor merupakan salah satu bentuk implementasi dari prioritas kebijakan luar negeri Australia. Dalam perkembangan hubungan ekonomi politik Timor Leste – Australia terdapat tiga perbenturan kepentingan yang intensif. **Pertama**, keinginan Australia untuk mendapatkan akses istimewa terhadap sumber daya alam khususnya minyak dan gas yang bertolak belakang dengan ketetapan Timor Leste yang mengklaim dan menuntut kedaulatan atas sumber daya tersebut. **Kedua**, keinginan Australia untuk membangun institusi ekonomi publik yang berlandaskan privatisasi dan pasar terbuka yang dihalangi oleh pemerintahan Fretilin. **Ketiga**, keinginan Australia untuk menjadi kekuatan utama terhalang oleh keinginan Timor Leste yang membangun kerjasama dengan Portugis dan China.<sup>13</sup>

Kepentingan politik maupun ekonomi menjadi dasar bagi langkah Australia yang baru terhadap Timor Leste. Australia menjadikan isu Timor Timur sebagai perhatian publik Australia. Reaksi rakyat Australia terhadap gejolak di Timor Timur itu dibenarkan Australia sebagai awal dilaksanakannya kebijakan luar negeri tentara Australia untuk masuk di Timor Timur. Kepentingan Australia yang berdimensi ekonomi didorong oleh kebutuhan untuk menemukan sumber energi yang baru. Celah Timor yang sudah dieksplorasi dan diperkirakan mengandung cadangan minyak

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 6.

<sup>11</sup> Michael K. Connors, "Australia in the Asia Pacific", dalam Michael K. Connor, Remi Davyson and John Dosch (eds). *The New Global Politics of the Asia Pacific* (London: Routledge Curzon, 2004).

<sup>12</sup> La'o Hamutuk, "Tinjauan Ulang Mengenai Minyak dan Gas di Laut Timor", *Latar Belakang Sejarah Laut Timor, Loc.Cit.*, hal. 3.

<sup>13</sup> Aleksius Jemadu, "Perubahan Orientasi Politik Keamanan Australia di bawah PM John Howard", *Loc.Cit.*, hal. 152.

yang kaya menjadi andalan Australia di tahun-tahun selanjutnya. Jasa keamanan di Timor Timur oleh PBB merupakan usaha Australia dalam menyelamatkan kekayaan alam tersebut.

### **Proyek *Greater Sunrise***

Terdapat kandungan gas yang sangat besar di bawah Laut Timor. Kandungan gas tersebut ditemukan pada tahun 1974 pada dua tempat yang berbeda, yaitu *Sunrise* dan *Troubador*. Beberapa perusahaan di bawah pimpinan Woodside ingin mengembangkan proyek tersebut yang dikenal sebagai *Greater Sunrise*. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menginvestasikan uang sebanyak 200 juta dolar Australia untuk melakukan studi, pengeksplorasi serta pengeboran, dan akan dilanjutkan dengan investasi sebesar 6 miliar dolar Australia untuk memproduksi dan memproses fasilitas-fasilitas pendukung.<sup>14</sup>

*Greater Sunrise* lebih dekat ke wilayah Timor Leste (95 mil ke arah Timur) jika dibandingkan dengan Australia (250 mil dari arah Barat), namun sebagian besar dari ladang *Greater Sunrise* lebih dekat ke wilayah Indonesia dibandingkan dengan Timor Leste. Pada tahun 1972, pemerintah Australia dan Indonesia melakukan sebuah kesepakatan tentang batas-batas laut dari kedua negara. Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia tidak dapat mengklaim apapun dari *Greater Sunrise*. Bagian dari *Greater Sunrise* yang lebih dekat ke wilayah Indonesia dibandingkan dengan wilayah Timor Leste akan masuk ke dalam batas laut Australia.<sup>15</sup>

Australia dan Timor Leste hingga saat ini belum mencapai kesepakatan tentang batas-batas laut dari kedua negara tersebut. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS), Australia dan Timor Leste disarankan untuk melakukan suatu kesepakatan tentang batas-batas laut berdasarkan pada hukum internasional untuk mencapai sebuah solusi yang adil. Dalam Konvensi tersebut ditetapkan bahwa:

“Kesepakatan yang masih ditangguhkan...negara-negara yang bersangkutan, dengan jiwa penuh pengertian dan kerjasama, harus melakukan segala usaha untuk mencapai sebuah kesepakatan sementara mengenai keadaan praktis, dan selama dalam periode transisi tersebut, tidaklah untuk mengancam atau menghalangi usaha untuk mencapai kesepakatan akhir. Kesepakatan semacam itu harus tidak mengancam pembatasan-pembatasan akhir.”<sup>16</sup>

Kesepakatan Penyatuan Internasional (*International Unitization Agreement*) *Sunrise* dan Perjanjian CMATS (*Treaty on Certain Maritime Arrangements in Timor Sea*) merupakan kesepakatan sementara antara Australia dan Timor Leste yang mengizinkan berlanjutnya proyek *Greater Sunrise* pra ditentukan batasan-batas laut. Berdasarkan kesepakatan unitisasi, pemerintah dari kedua negara menyetujui untuk membagi wilayah *Greater Sunrise* pada lokasi ladang gas, yaitu 79,9% berada di dalam batas Australia dan 20,1% lainnya berada dalam Daerah Pengeksplorasi Minyak Bersama/ JPDA yang dikelola bersama oleh Australia dan Timor Leste. Batas antara ladang gas yang terletak pada bagian Australia dan Daerah Pengeksplorasi Minyak Bersama/ JPDA sama seperti batas yang telah ditentukan dalam kesepakatan yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia, yaitu garis equidistans yang disederhanakan.<sup>17</sup>

Berdasarkan Perjanjian Laut Timor, Timor Leste berhak atas 90% dari hasil ladang gas yang termasuk dalam JPDA dan Australia mendapatkan 10% lainnya. Australia dan Timor Leste akan menerima masing-masing 50% dari hasil *Sunrise* berdasarkan Perjanjian CMATS. Penentuan batas-batas laut antara Australia dan Timor Leste jika telah mencapai kesepakatan akhir akan

---

<sup>14</sup> Petroleum Economist, 2011, “*Timor Leste: The Great Game of Greater Sunrise*”, hal. 2, <[www.petroleum-economist.com](http://www.petroleum-economist.com)>. [diakses 18 Januari 2013]

<sup>15</sup> Buletin La’o Hamutuk, “Kronologi Negosiasi laut Timor”, *Loc. Cit.*, hal. 5.

<sup>16</sup> Bagian 83 (3) Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS)

<sup>17</sup> Istilah ini digunakan oleh pemerintah Australia dalam meguraikan batas-batas garis samping pada bagian Timur dan Barat Daerah Pengeksplorasi Minyak Bersama/ JPDA. Lihat “Batas-Batas Perairan Australia-Timor Leste: Mendapatkan Solusi yang Adil”, Departemen Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia, Juli 2004, hal.1.

menempatkan pemerintah dari kedua negara untuk melakukan negosiasi ulang mengenai pembagian hasil dari proyek tersebut.

### **Tekanan Politik Pemerintah Negara Australia dan Perusahaan Woodside Terhadap Timor Leste**

Hubungan kerjasama antara Australia dan Timor Leste berpijak pada *power* dan kemampuan diplomasi, yang terutama berkaitan dengan kondisi interdependensi yang asimetris. Dalam hal ini, Australia merupakan *major power* di kawasan Asia Pasifik, sementara Timor Leste adalah bagian dari wilayah pengaruh (*sphere of influence*) Australia. Australia merupakan negara yang mampu menerapkan *power* yang dimilikinya untuk mencapai tujuan terhadap hubungan kerjasamanya dengan Timor Leste.

*Power* adalah pengaruh atau kekuasaan secara aktual maupun potensial suatu negara (aktor lainnya) yang dapat digunakan secara relatif untuk memaksa negara lain atau aktor lain, dikarenakan kemampuan politik, ekonomi dan keuangan, teknologi, militer, sosial budaya atau kemampuan lain yang dimilikinya.<sup>18</sup> Secara umum, *power* memiliki tiga unsur utama, yaitu:

1. Daya paksa (*force*) yang dapat didefinisikan sebagai ancaman eksplisit atau penggunaan kekuatan militer, ekonomi atau sarana pemaksa lainnya oleh aktor A terhadap aktor B demi mencapai tujuan politik A.
2. Pengaruh (*influence*) yang dapat didefinisikan sebagai penggunaan alat-alat persuasi (tanpa kekerasan) oleh aktor A demi menjamin agar perilaku aktor B sesuai dengan keinginan aktor A.
3. Wewenang (*authority*) yang dapat diartikan sebagai sikap tunduk sukarela aktor B pada arahan yang diberikan aktor A. Sikap tunduk ini muncul dari persepsi B tentang A, misalnya penghormatan, rasa solidaritas, kasih sayang, kedekatan, mutu kepemimpinan dan keahlian.<sup>19</sup>

Dalam hubungan kerjasama antara Australia dan Timor Leste, Australia menerapkan unsur pengaruh (*influence*), yaitu melalui penggunaan tekanan politik. Tekanan politik merupakan alat-alat persuasi (tanpa kekerasan) oleh Australia terhadap Timor Leste untuk menjamin agar perilaku Timor Leste sesuai dengan keinginan Australia. Hal ini berkaitan dengan tercapainya Perjanjian CMATS (*Treaty on Certain Maritime Arrangements in Timor Sea*) dalam pengelolaan proyek *Greater Sunrise* di Laut Timor antara Australia dan Timor Leste.

Teori dua landas benua Australia merupakan dasar awal dari klaim Australia terhadap ladang *Greater Sunrise* di Laut Timor yang secara geografis lebih berdekatan dengan negara Timor Leste. Australia telah lama berupaya untuk memperluas aksesnya pada ladang minyak dan gas di *Greater Sunrise* sejak awal ditemukannya ladang tersebut pada tahun 1974. Perusahaan minyak Woodside (Australia) telah mengeksplorasi ladang *Greater Sunrise* sejak sebelum pendudukan Indonesia di Timor Leste pada tahun 1975. Salah satu upaya Australia untuk memperluas akses tersebut adalah dengan menanamkan pengaruh politiknya di Timor Leste secara intensif sejak pra referendum (pertengahan 1999) hingga pasca referendum.<sup>20</sup> Australia merupakan negara yang membantu perjuangan rakyat Timor Leste untuk merdeka hingga menuju kemerdekaan pada tahun 2002.

Sejak Oktober 1999, Australia dipercaya oleh PBB sebagai pemimpin pasukan penjaga perdamaian sekaligus sebagai pemimpin pemerintahan sementara PBB di Timor Leste melalui *The United Nations Transitional Administration in East Timor* (UNTAET) yang menggantikan posisi Indonesia. Selama masa kepemimpinannya, Australia terus melakukan negosiasi dengan Timor

---

<sup>18</sup> Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations and World Politics: Security, Economy, Identity*, (New Jersey: Prentice Hall, 1997), hal. 86.

<sup>19</sup> Mohtar Mas' oed, *Loc. Cit.*, hal 118-119.

<sup>20</sup> Geoffrey C. Gunn, 1999, "Timor Loro Sae: 500 years", dalam Nugroho Katjasungkana (ed), *500 Tahun Timor Loro Sae*, (Yogyakarta: INSISTPress, 2005), hal. 449.

Leste mengenai pembagian hasil di Laut Timor.<sup>21</sup> Posisi Australia sebagai pemimpin pasukan perdamaian tersebut secara politik dimanfaatkan oleh pemerintah Australia untuk mencapai kepentingan ekonominya sejak awal kemerdekaan Timor Leste. Hal ini pun menunjukkan bahwa Australia ingin memperluas *sphere of influence* di Timor Leste agar wilayah tersebut stabil.

Keterlibatan negara Australia terhadap kemerdekaan Timor Leste secara tidak langsung memberikan posisi politik tersendiri bagi Australia di negara tersebut. Posisi ini semakin dikukuhkan dengan bantuan ekonomi dari Australia terhadap pembangunan Timor Leste yang masih perlu melakukan penataan di berbagai bidang. Australia menggunakan kesempatan tersebut untuk mencapai tujuannya dalam memperluas akses terhadap kandungan minyak dan gas ladang *Greater Sunrise*. Pembagian zona kerjasama berdasarkan Perjanjian Celah Timor 1989 yang disepakati oleh Australia dan Indonesia merupakan pencapaian yang besar bagi Australia.

Pasca referendum, selama pemerintahan transisi PBB (UNTAET), Australia dan Timor Leste menyadari pentingnya minyak di dasar laut bagi masa depan Timor Leste sehingga kontak-kontrak perusahaan minyak dipertahankan dan eksplorasi di Laut Timor dilanjutkan agar Timor Leste menerima pendapatan dari minyak dan gas tersebut. Selaku pemerintah Timor Timur, UNTAET menandatangani dokumen Pertukaran Nota dengan Australia untuk tetap melanjutkan kesepakatan Celah Timor antara Australia dan Indonesia, namun posisi Indonesia ditempati oleh Timor Leste.<sup>22</sup>

Pada 5 Juli 2001, Australia dan Timor Timur menandatangani Rancangan Perjanjian Laut Timor yang menggantikan Pertukaran Nota Februari 2000. Rancangan ini mencakup pengembangan minyak di wilayah yang disebut Wilayah Pengembangan Minyak Bersama (*Joint Petroleum Development Area*, JPDA), yang dalam Perjanjian Celah Timor antara Australia dan Indonesia disebut dengan Zona A. Menurut perjanjian yang diusulkan, Timor Leste akan memperoleh 90% royalti minyak dan gas dari JPDA. Ladang *Greater Sunrise* berada di luar garis batas JPDA menyebabkan disusunya sebuah kesepakatan unitisasi khusus (unitisasi berarti melihat ladang sebagai satu unit atau kesatuan). Rancangan memberikan 90% pendapatan kepada Timor Leste dari 20% produksi (yaitu 18%) di *Greater Sunrise* karena sekitar 20% ladang berada di dalam JPDA.

Ketidakadilan Australia dalam penetapan pembagian wilayah *Greater Sunrise* menurut Perjanjian IUA menimbulkan kontroversi yang mengundang reaksi dari berbagai negara dan aktivis LSM yang mendukung Timor Leste. Timor Leste pun mengajukan penyelesaian sengketa perbatasan maritim ini melalui Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dan sesuai Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). Pada 21 Maret 2002, Australia menarik diri dari kasus perbatasan Laut Timor yang dilimpahkan oleh Timor Leste kepada Mahkamah Pengadilan Internasional dan menyatakan keinginannya untuk menyelesaikan permasalahan melalui perundingan bilateral dengan Timor Leste.<sup>23</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Australia mementingkan kekuatan *bargaining position* secara diplomatik bilateral terhadap Timor Leste. *Bargaining position* Australia terhadap Timor Leste ini bersifat asimetris karena Australia telah sejak lama menanamkan pengaruh politiknya di Timor Leste.

Pada 19 Juli 2002, putaran pertama negosiasi antara Timor Leste dan Australia tentang kesepakatan penyatuan internasional *Sunrise* berakhir dengan ikrar kedua pihak untuk mencapai kesepakatan sebelum akhir 2002. Kesepakatan penyatuan internasional ini akan mengatur bagaimana pembagian ladang *Greater Sunrise*, yang mengandung 8,4 triliun kaki kubik gas alam.<sup>24</sup> Australia memberi prioritas tinggi pada penyelesaian kesepakatan sehingga proyek *Sunrise* dapat berlanjut.

---

<sup>21</sup> "Negosiasi UNTAET dengan Australia".

<[http://id.www.org/Administrator\\_Perserikatan\\_Bangsa\\_Bangsa\\_untuk\\_Timor\\_Timur](http://id.www.org/Administrator_Perserikatan_Bangsa_Bangsa_untuk_Timor_Timur)>. [diakses 16 Januari 2013]

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Guteriano Neves, et.al., *LNG Sunrise di Timor Leste: Impian, Kenyataan dan Tantangan*, (Timor Leste: La'o Hamutuk, 2008)., hal. 94.

<sup>24</sup> *Ibid.*

Pada 3 Oktober 2002, PM Timor Leste Mari Alkatiri mengusulkan pembahasan awal mengenai batas-batas maritim kepada PM Australia John Howard. Sebulan kemudian, Howard memberikan jawaban dengan menyatakan bahwa Australia berkeinginan untuk memulai diskusi setelah Perjanjian Laut Timor diberlakukan dan kesepakatan penyatuan *Sunrise* telah diselesaikan. Pada tanggal 18 November, Alkatiri menulis jawaban bahwa tidak terdapat alasan mengapa penyelesaian perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara ini diperlukan sebelum pembicaraan batas dimulai, dan memberi sebuah jadwal kilat untuk membahas persoalan perbatasan.<sup>25</sup>

Pemerintah Australia, John Howard melanjutkan negosiasi kesepakatan penyatuan *Sunrise* dengan mengaitkan kesepakatan ini dengan ratifikasi perjanjian Laut Timor. Hal ini menjadikan proyek Bayu-Undan sebagai pancingan Australia bagi konsesi Timor Leste atas sebagian besar pendapatan negara Australia dari proyek *Sunrise* yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer menyatakan bahwa Australia mungkin tidak akan meratifikasi Perjanjian Laut Timor hingga Februari 2003 atau sesudahnya, yang sebenarnya melanggar komitmen kedua pemerintahan untuk menyelesaikan ratifikasi dalam tahun 2002.<sup>26</sup> Penundaan ratifikasi dapat mempengaruhi perjanjian penjualan gas dari Bayu-Undan dan *Sunrise*, yang dapat menambah tekanan pada pemerintah Timor Leste untuk secara tegas menerima syarat-syarat penyatuan *Sunrise*, yang secara tidak adil menguntungkan Australia, dan bukannya menekankan agar batas-batas maritim dinegosiasikan.

Pada 27 November 2002, menurut laporan *The Age* (harian yang terbit di Melbourne), Perdana Menteri Howard menelpon Perdana Menteri Alkatiri dan menegaskan:

“atas nama perusahaan-perusahaan minyak, jika anda tidak menandatangani kesepakatan pembangunan ladang *Greater Sunrise* yang merupakan ladang terbesar yang menjadi milik Timor Leste dan menyerahkan kekayaan alam tersebut dalam jumlah besar kepada Australia, maka kami tidak akan menyampaikan legislasi Perjanjian Laut Timor kepada senat hari ini, dan membolehkan pembangunan ladang lainnya yang lebih kecil yang diharapkan oleh pemerintah Timor Leste agar dieksplorasi. Lakukan seperti yang kami kehendaki atau kami membatalkan kontrak yang menguntungkan dengan Jepang untuk eksplorasi ladang minyak Bayu-Undan.”<sup>27</sup>

Pada Desember 2002, mitra-mitra *Sunrise*; Woodside, Conocophillips, Shell dan Osaka Gas mengumumkan penundaan tidak terbatas atas proyek *Sunrise*, dengan mengklaim bahwa tak ada satu pun dari kilang pengolahan LNG mengambang atau jaringan pipa ke Darwin layak secara ekonomi. Mayoritas pihak melihat hal ini sekedar taktik untuk menekan Timor Leste agar menerima harapan-harapan Australia pada *Sunrise*. Hal ini menimbulkan reaksi dari *East Timor Action Network/ETAN* yang berdemonstrasi di Washington menuntut agar Australia patuh pada hukum internasional. Australia menolak ketidaksetujuan Timor Leste untuk menyerahkan kedaulatan bagian dari *Greater Sunrise* yang berada di luar JPDA, menyatakan bahwa parlemen Australia tidak akan meratifikasi Perjanjian Laut Timor hingga Timor Leste menyerah dan menandatangani versi usulan Australia tentang perjanjian penyatuan *Sunrise* tersebut.

Pada 4 Maret 2003, PM Timor Leste Mari Alkatiri mengirim surat kepada John Howard bahwa perjanjian penyatuan *Sunrise* (IUA) sedang dikirim ke Dewan Menteri RDTL dan meminta sebuah perkiraan waktu kapan pembahasan batas-batas permanen akan dimulai, dan sebuah tanggal diskusi yang Howard anggap dapat menghasilkan garis batas yang permanen. Kesepakatan penyatuan *Sunrise* akhirnya ditandatangani oleh Timor Leste pada 6 Maret 2003, bersamaan dengan ratifikasi kesepakatan Laut Timor oleh pihak Australia. Pra kesepakatan penyatuan *Sunrise* berlaku, kesepakatan tersebut harus diratifikasi lebih dulu oleh parlemen dari dua negara.<sup>28</sup> Parlemen

<sup>25</sup> Buletin La'o Hamutuk, “Kronologi Negosiasi laut Timor”, *Loc.Cit.*, hal. 5.

<sup>26</sup> Guteriano Neves, et.al., *Op.Cit.*, hal. 95.

<sup>27</sup> Ferdi Tanoni, *Skandal Laut Timor: Sebuah Barter Politik-Ekonomi Canberra-Jakarta*, (Kupang: Yayasan Peduli Timor Barat, 2008), hal. 88.

<sup>28</sup> Buletin La'o Hamutuk, “Kesepakatan Penyatuan *Sunrise* ditanda-tangani”, *Perjanjian CMATS, Loc.Cit.*, hal. 9.



Australia telah memulai proses tersebut, namun di lain pihak, Timor Leste tidak mau terburu-buru untuk meratifikasi kesepakatan tersebut. Timor Leste menunda proses ini agar mendorong Australia untuk membicarakan persoalan batas-batas laut. Babak baru perundingan dimulai pada 19-22 April 2004.

Pada Agustus tahun 2004, perusahaan Woodside membuat studi kelayakan mengenai pengaliran gas *Sunrise* ke Timor Leste. Menteri Luar Negeri Timor Leste, José Ramos-Horta berusaha untuk melakukan negosiasi dengan Alexander Downer untuk mempertimbangkan kembali studi kelayakan tersebut. Dalam perundingan selanjutnya, Downer bersama dengan CEO (*Chief Executive Officer*) perusahaan Woodside Don Voelte kemudian menekan Timor Leste untuk menyerahkan hak-hak perbatasan maritimnya dengan klaim bahwa peluang pasar bagi gas alam ladang *Greater Sunrise* hampir tertutup, dan jika proyek tidak segera dikembangkan, maka tidak akan jadi sama sekali.<sup>29</sup> Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah Australia dan perusahaan Woodside menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya minyak dan gas alam di ladang *Greater Sunrise* seakan-akan tidak dapat dilakukan oleh pihak/ negara lain.

Pada 12 Januari 2006, pemerintah Australia dan pemerintah Timor Leste mencapai kesepakatan dengan menandatangani satu perjanjian untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi ladang *Greater Sunrise*. Perjanjian mengenai Ketentuan Laut Tertentu di Laut Timor (*Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea – CMATS*) dihasilkan dari suatu proses diplomatis yang berlangsung lebih dari 30 tahun yang memperpanjang ketentuan bahwa penyelesaian setiap sengketa perjanjian akan dilakukan melalui perundingan bilateral. Perjanjian ini membagi penghasilan Australia dan Timor Leste dengan porsi 50:50 dari hasil produksi minyak dan gas dari wilayah-wilayah yang sebelumnya disengketakan, tetapi menunda memutuskan negara mana yang memiliki wilayah laut dan dasar laut yang mana.

### **Kerangka Kerja Perjanjian CMATS**

Perjanjian CMATS merupakan perjanjian bilateral, yaitu kontrak yang ditandatangani antara dua pemerintah yang kekuatannya lebih besar dibandingkan hukum nasional. Perjanjian-perjanjian mengenai minyak dan gas antara Timor Leste dan Australia tidak memungkinkan satu negara untuk mundur dari kesepakatan yang telah dicapai tanpa mempertimbangkan pemimpin politik yang berkuasa. Perjanjian dapat dibatalkan hanya jika kedua negara sepakat membatalkannya, sesuai dengan pasal 54 Konvensi Wina 1969 mengenai Hukum Perjanjian.<sup>30</sup> Kedua pemerintah juga dimungkinkan untuk mengubah satu perjanjian yang telah diratifikasi, yaitu dengan menentukan satu perjanjian yang baru.

Dalam pengelolaan proyek *Greater Sunrise*, Perjanjian CMATS merupakan kerangka kerja yang mengesahkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kandungan minyak dan gas alam di wilayah Laut Timor yang berada di luar JPDA. Perjanjian CMATS berisi dua belas pasal, dua lampiran, dan dua surat penjelasan yang mengubah isi Perjanjian Laut Timor 2002 dan Kesepakatan Penyatuan Internasional (IUA) *Sunrise* yang ditandatangani pada tahun 2003.<sup>31</sup> Pokok isi Perjanjian CMATS menjelaskan mengenai penundaan pembahasan perbatasan laut dan pengesahan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas alam di *Greater Sunrise*, jangka waktu perjanjian, distribusi pendapatan, hak penangkapan ikan, komisi kelautan dan penyelesaian sengketa Perjanjian CMATS.

Penundaan pembahasan perbatasan laut didasarkan pada pasal 2 Perjanjian CMATS. Pada pasal 2 CMATS dinyatakan bahwa perjanjian ini tidak mengubah posisi Australia dan Timor Leste mengenai klaim wilayah dengan mengesampingkan pembahasan perbatasan laut selama berlakunya perjanjian ini. Perjanjian CMATS berkali-kali menyebutkan bahwa tidak satu pihak pun akan menuntut hak kedaulatan (pasal 4.1), membahas perbatasan laut (pasal 4.6 dan 4.7) atau terlibat

---

<sup>29</sup> Guteriano Neves, et al., *Op.Cit.*, hal. 12.

<sup>30</sup> Buletin La'o Hamutuk, *Perjanjian CMATS, Loc.Cit.*, hal. 9.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 8.

dalam proses hukum yang berkaitan dengan perbatasan laut atau yurisdiksi teritorial (pasal 4.4 dan 4.5).

Pengesahan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Australia terhadap sumber daya minyak dan gas alam di *Greater Sunrise* oleh Timor Leste dinyatakan pada pasal 4.2.<sup>32</sup> Dalam pasal ini dikemukakan bahwa hukum nasional Australia dan Timor Leste mengatur kegiatan sumber alam di bawah laut dan mengesahkan hukum yang baru berlaku seperti pada 19 Mei 2002 ketika Timor Leste belum menjadi negara yang berdaulat. Penegasan hal ini terdapat dalam surat penjelasan kedua Menteri Luar Negeri, yaitu Timor Leste tidak memiliki undang-undang yang mengatur kegiatan sumber alam di bawah laut pada saat itu, sementara Australia memiliki undang-undang khusus yang mencakup perjanjiannya dengan Indonesia pada tahun 1972 dan undang-undang perminyakan pada tahun 1967 dan 1994.

Perjanjian CMATS berlaku untuk 50 tahun sesudah ratifikasi dan pemberlakuannya, namun jangka waktu perjanjian ini dapat berakhir lebih cepat jika produksi *Sunrise* tidak dimulai dalam waktu 10 tahun atau berakhir kurang dari 45 tahun setelah CMATS berlaku.<sup>33</sup> Jangka waktu ini dinyatakan dalam pasal 12 Perjanjian CMATS. Perjanjian dapat diperpanjang jika ada kesepakatan dari Australia dan Timor Leste. Jangka waktu perjanjian dalam 50 tahun didasarkan pada pertimbangan komersial yang memberikan kepastian kepada perusahaan-perusahaan perminyakan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber minyak dan gas tanpa perubahan kepemilikan sampai minyak dan gas telah dihabiskan. Berdasarkan pasal 3 CMATS, jangka waktu ini disesuaikan dengan jangka waktu Perjanjian Laut Timor dan Perjanjian Celah Timor sebelumnya, serta dengan jangka waktu proyek minyak dan gas.

Distribusi pendapatan *Sunrise* dijelaskan dalam pasal 5 CMATS, yaitu Australia dan Timor Leste akan berbagi penghasilan hulu dari Kawasan Unit *Sunrise* dengan porsi 50:50. Pendapatan hulu yang dimaksud dalam pasal ini adalah eksploitasi hulu, yaitu nilai minyak dan gas pada titik valuasi ketika keluar dari sumur, sebelum memasuki pipa atau kapal. Setiap negara akan mendapatkan pendapatan sesuai dengan undang-undang perpajakannya dan IUA 2003—yang menetapkan 18% *Sunrise* kepada Timor Leste dan 82% kepada Australia. Dalam pembagian penghasilan tersebut, Australia akan membayar Timor Leste sebesar 32% lagi sehingga setiap negara mendapatkan jumlah yang sama. Pelaksanaan pembagian pendapatan dan mekanisme penyelesaian perbedaan antara kedua negara dijelaskan dalam pasal 6 dan lampiran.

Pasal 8.1 (b) bersama dengan lampiran II, membagi sumber alam kolom air (mencakup ikan) antara Australia dan Timor Leste sepanjang tepi Selatan JPDA, memperbolehkan nelayan Timor Leste untuk bekerja di dalam JPDA dengan ketentuan bahwa kegiatan tersebut tidak menghambat kegiatan-kegiatan perminyakan. Perjanjian CMATS tidak menyebutkan hak menangkap ikan di kawasan-kawasan lateral di sebelah Timur dan Barat JPDA yang sebelumnya disengketakan. Pada tahun 1997, Australia menandatangani satu perjanjian yang memberikan Indonesia hak kolom air di kawasan-kawasan tersebut, namun tidak pernah diratifikasi sehingga kepastiannya masih dipertanyakan. Timor Leste dan Indonesia belum merundingkan hak kolom air di lepas pantai Utara, Timur dan Selatan Timor Leste. Perundingan ini dapat menyelesaikan permasalahan perbatasan dengan Australia, jika Australia melanjutkan perbatasan kolom air yang disepakati dengan Indonesia pada tahun 1997 tersebut.

Pasal 9 CMATS membentuk suatu Komisi Kelautan dengan menteri atau perwakilan yang ditunjuk oleh partai kedua negara.<sup>34</sup> Komisi Kelautan mengadakan rapat sekali setiap tahun untuk meninjau status ketentuan perbatasan laut—tetapi tidak mengubahnya—dan berkonsultasi mengenai keamanan, lingkungan, pengelolaan sumber alam dan masalah-masalah lainnya. Kekuasaan Komisi Kelautan mencakup sumber alam yang dapat diperbarui (ikan) dan tidak dapat diperbarui (minyak dan gas), serta promosi strategi-strategi pengelolaan yang berkelanjutan. Komisi ini tidak memiliki

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal 9.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

wewenang terhadap eksplorasi dan eksploitasi minyak dari *Greater Sunrise*. Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hal tersebut diberikan kepada Komisi *Sunrise* berdasarkan pasal 9.2 Kesepakatan Penyatuan Internasional *Sunrise*.

Komisi *Sunrise* beranggotakan dua orang Australia dan satu orang Timor Leste yang bertugas untuk mengkoordinasikan kerja otoritas pengaturan di IUA—yaitu pemerintah Australia dan Otoritas Mengenai Laut Timor (TSDA). Ketidaksepakatan yang tidak dapat diselesaikan oleh otorita pengaturan atau Komisi *Sunrise*, permasalahannya dapat diajukan ke arbitrase berdasarkan Pasal 26.2 dan Lampiran IV IUA.<sup>35</sup> Penyelesaian sengketa CMATS berbeda dengan IUA, yaitu perjanjian CMATS diselesaikan dengan perundingan bilateral, namun sengketa mengenai pengumpulan dan pembagian pajak dari *Greater Sunrise* dapat diatasi oleh seorang penasehat—seorang penengah yang ditunjuk oleh kedua negara atau oleh satu badan internasional yang tidak memihak. Perundingan bilateral merupakan suatu proses yang hampir selalu menguntungkan pihak yang lebih kuat.

Ladang *Greater Sunrise* memiliki kandungan gas yang terperangkap (*stranded gas*) sehingga harus dicairkan dan dikapalkan melalui tanker kepada pelanggan di negara lain.<sup>36</sup> Proses pencairan ini memerlukan fasilitas industri yang besar, yang dapat dibangun di Timor Leste atau Australia dan akan dihubungkan ke ladang *Greater Sunrise* melalui sebuah jaringan pipa gas bawah laut. Penghasilan dari pencairan gas ini disebut dengan pendapatan hilir yang hanya akan diperoleh negara di tempat pipa tersebut dibangun. Pendapatan hilir yang hanya akan diperoleh negara di tempat pabrik gas bumi dengan jaringan pipa tersebut dibangun.

Kalangan pemerintahan Timor Leste telah menyatakan komitmen untuk membawa jaringan pipa tersebut ke daratan Timor Leste agar dapat menyokong pembangunan dan perkembangan ekonomi yang signifikan. Pemerintah Australia maupun perusahaan Woodside telah lama mengkampanyekan agar jaringan pipa tersebut dibangun di Australia karena alasan teknis, keuangan dan politis. Hingga saat ini opsi-opsi pembangunan pipa masih menjadi perdebatan antara pemerintah Timor Leste dan Australia serta Woodside sebagai operator proyek *Greater Sunrise*.

### **Respon Internasional Terhadap Perjanjian CMATS**

Permasalahan wilayah kedaulatan maritim antara Timor Leste dan Australia telah lama menjadi sorotan internasional. Sejak kepundudukan Portugis hingga merdekanya Timor Leste, penetapan batas Laut Timor antara kedua negara ini belum menemukan titik terang. Kesepakatan-kesepakatan yang telah tercapai antara Timor Leste dan Australia hanya membahas bagian kecil dari permasalahan tersebut, namun tidak menyelesaikan permasalahan dasar mengenai hak atas kedaulatan wilayah, terutama bagi Timor Leste. Kesepakatan-kesepakatan tersebut, terutama Kesepakatan Penyatuan Internasional *Sunrise* dan Perjanjian CMATS telah mengundang berbagai reaksi dan kritik terhadap Australia.

Reaksi dan kritik keras terutama dikemukakan oleh organisasi La'õ Hamutuk. La'õ Hamutuk merupakan organisasi gabungan antara Timor Leste dan internasional yang mendorong dan memfasilitasi kampanye internasional untuk menekan Australia agar menghormati hak negara Timor Leste. Pasca kemerdekaan Timor Leste, lebih dari 100 organisasi dari 19 negara yang mendesak pemerintah Australia untuk memperlakukan Timor Leste dengan adil dan sebagai bangsa yang berdaulat, dengan hak yang sama seperti Australia. Media-media internasional telah menulis artikel-artikel yang mendukung kampanye La'õ Hamutuk tersebut, termasuk media Australia dan masyarakat negara Australia.

La'õ Hamutuk telah menulis banyak artikel mengenai pengembangan minyak dan gas Timor Leste, yaitu tinjauan mengenai sejarah serta proses perundingan yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan terutama dengan Australia, salah satunya Perjanjian CMATS. La'õ Hamutuk menyimpulkan bahwa Perjanjian CMATS merupakan perbaikan dari kesepakatan sebelumnya

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 10.

<sup>36</sup> Guteriano Neves et.al., *Op.Cit.*, hal. 13.

dengan Australia pada tahun 2002 dan 2003, tetapi telah menyebabkan persoalan serius mengenai kedaulatan wilayah Timor Leste.<sup>37</sup>

Pasca disetujuinya kerangka kerja Perjanjian CMATS pada tahun 2006, La'o Hamutuk telah berusaha untuk menghimbau pemerintah Timor Leste melalui surat kepada parlemen agar mempertimbangkan keputusan untuk meratifikasi Perjanjian CMATS. La'o Hamutuk berpendapat bahwa perjanjian tersebut tidak harus ditandatangani dalam waktu dekat, ketika tekanan masyarakat sipil sedang efektif dalam mendorong Australia untuk menghormati kedaulatan dan hak Timor Leste.<sup>38</sup> Pengelolaan Bayu-Undan dengan baik akan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk kebutuhan Timor Leste sedikitnya lima belas tahun, sehingga pengembangan *Sunrise* dapat ditunda.

Hingga saat ini berbagai negara, organisasi, pers dan media-media serta masyarakat internasional masih aktif dalam mengikuti perkembangan perbatasan laut Timor Leste dan Australia, terutama Perjanjian CMATS sebagai kerangka kerja terbaru dalam pengelolaan sumber minyak dan gas di wilayah-wilayah yang disengketakan. Kampanye-kampanye masyarakat Australia yang didukung oleh warga negara dan pejabat-pejabat Timor Leste dan di seluruh dunia diharapkan mampu menggerakkan pemerintah Australia untuk merundingkan penyelesaian batas laut dan kesepakatan yang lebih adil dengan Timor Leste.

## Simpulan

Penulis membuat kesimpulan penelitian ini dalam beberapa poin. **Pertama**, adanya pengaruh timbal balik antara ekonomi dan politik karena kebijakan politik suatu negara seringkali didasarkan pada masalah ekonomi, dan sebaliknya kebijakan ekonomi seringkali didasarkan pada masalah politik. Perjanjian CMATS yang telah dicapai antara Australia dan Timor Leste untuk mengelola proyek *Greater Sunrise* tidak bisa dipandang semata dari sudut pandang ekonomi. Penandatanganan perjanjian tersebut juga didukung oleh pertimbangan-pertimbangan politis antara kedua pemerintahan.

Australia merupakan negara pengimpor minyak namun memiliki industri perminyakan yang sangat maju. Timor Leste merupakan negara baru yang masih melakukan penataan di berbagai bidang sehingga belum memiliki pengalaman maupun infrastruktur yang berkaitan dengan industri perminyakan, namun pendapatan negara Timor Leste sangat bergantung dari penghasilan proyek minyak dan gas. Kenyataan ekonomi inilah yang memaksa pemerintah Timor Leste untuk bekerjasama dengan pemerintah Australia dalam mengelola proyek *Greater Sunrise*. Kesepakatan mengenai batas maritim kedua negara belum tercapai, namun kerjasama ini memungkinkan perusahaan-perusahaan internasional maju dengan proyek-proyek minyak dan gas, sehingga akan memberikan penghasilan tambahan kepada kedua negara. Keadaan interdependensi ekonomi akan mengekang negara untuk tidak merusak hubungan politik dengan mitranya, karena biaya ekonomi. Semakin besar hubungan saling ketergantungan antara Australia dan Timor Leste, maka semakin besar kepentingan untuk mempertahankan hubungan politik guna mempertahankan interaksi-interaksi ekonomi di antara kedua negara.

**Kedua**, penyetujuan Timor Leste terhadap kerangka kerja Perjanjian CMATS tidak sepenuhnya didasarkan atas tekanan politik dari negara Australia. Berpijak dari kesepakatan sebelumnya (Perjanjian Laut Timor dan Kesepakatan Penyatuan Internasional *Sunrise*), Perjanjian CMATS merupakan perbaikan yang ditawarkan oleh Australia. Perbaikan poin-poin kerjasama dalam Perjanjian CMATS tersebut didorong oleh tekanan dari berbagai kalangan internasional yang mencakup negara-negara, organisasi-organisasi, pers dan masyarakat internasional melalui kampanye internasional dan demonstrasi terhadap Australia untuk menghormati kedaulatan dan hak negara Timor Leste. Tindakan-tindakan pemerintah Australia terhadap Timor Leste memunculkan

---

<sup>37</sup> Buletin La'o Hamutuk, "Kritik mengenai Perjanjian CMATS", *Perjanjian CMATS, Loc.Cit.*, hal. 10.

<sup>38</sup> "Pernyataan Pers Terhadap Perjanjian Eksplorasi *Greater Sunrise* Antara Timor Leste dan Australia", 2006, <[www.laohamutuk.org](http://www.laohamutuk.org)>. [diakses 15 April 2013]

pertanyaan-pertanyaan mengenai demokrasi di negara tersebut, bahkan masyarakat Australia tidak sepakat dengan sikap pemerintahnya.

Perjanjian CMATS telah menyebabkan persoalan serius mengenai kedaulatan wilayah Timor Leste walaupun perjanjian tersebut merupakan perbaikan dari kesepakatan-kesepakatan sebelumnya dengan Australia. Penentuan batas maritim seharusnya menjadi prioritas bagi Timor Leste dan Australia sementara Perjanjian CMATS berlaku, termasuk ketika proyek *Greater Sunrise* dilaksanakan. Penyelesaian sengketa seharusnya tidak hanya melalui perundingan bilateral yang tidak berimbang antara Australia sebagai *major power* di kawasan Asia Pasifik dan Timor Leste yang merupakan bagian dari wilayah pengaruh (*sphere of influence*) Australia. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang tidak memihak, mencakup pihak yang ditentukan oleh hukum internasional, khususnya Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (UNCLOS) akan menghasilkan kesepakatan yang lebih adil terutama bagi negara Timor Leste.

## Daftar Pustaka

### Buku:

Ferdi Tanoni. 2008. *Skandal Laut Timor: Sebuah Barter Politik-Ekonomi Canberra-Jakarta*. Kupang: Yayasan Peduli Timor Barat.

Geoffrey C. Gunn, 'Timor Loro Sae: 500 years'. Di dalam Nugroho Katjasungkana (ed). 2005. *500 Tahun Timor Loro Sae*. Yogyakarta: INSISTPress.

Guteriano Neves, et. al. 2008. *LNG Sunrise di Timor Leste: Impian, Kenyataan dan Tantangan*. Timor Leste: La'o Hamutuk.

Hilman Adil. 1993. *Hubungan Australia dengan Indonesia 1945-1962*. Jakarta: Djambatan.

Michael K. Connors, "Australia in the Asia Pacific". Di dalam Michael K. Connor, Remi Davyson and John Dosch (eds). 2004. *The New Global Politics of the Asia Pacific*. London: Routledge Curzon.

Mohtar Mas' oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi. 1999. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*. New York: MacMillan Publishing Company.

Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi. 1997. *International Relations and World Politics: Security, Economy, Identity*. New Jersey: Prentice Hall.

### Jurnal dan Working Paper:

Aleksius Jemadu, "Tinjauan Historis Kebijakan Keamanan Australia", *Kebijakan Politik dan Keamanan Australia di Kawasan Asia Pasifik*, Vol. 10, No.2, November 2006.

Buletin La'o Hamutuk, "Penjelasan Terhadap Penjelasan Kepentingan Nasional Australia", *Penyaringan PNTL Untuk Kembali Bertugas*, Vol.8, No.2, Juni 2007.

Buletin La'o Hamutuk, *Perjanjian CMATS*, Vol.7, No. 1, April 2006.

National Interest Analysis: Treaty between the Government of Australia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea, done at Sydney on 12 January 2006.

**Situs:**

“Negosiasi UNTAET dengan Australia”.

<[http://id.www.org/Administrator\\_Perserikatan\\_Bangsa\\_Bangsa\\_untuk\\_Timor\\_Timur](http://id.www.org/Administrator_Perserikatan_Bangsa_Bangsa_untuk_Timor_Timur)>. [diakses 16 Januari 2013]

“Pernyataan Pers Terhadap Perjanjian Eksplorasi *Greater Sunrise* Antara Timor Leste dan Australia”, 2006, <[www.laohamutuk.org](http://www.laohamutuk.org)>. [diakses 15 April 2013]

Petroleum Economist, 2011, “*Timor Leste: The Great Game of Greater Sunrise*”, hal. 2, <[www.petroleum-economist.com](http://www.petroleum-economist.com)>. [diakses 18 Januari 2013]

Raimundo de FátimaAlvesCorreia. “Resume skripsi Upaya Timor Leste dalam Menyelesaikan Batas Wilayah Laut dengan Australia”. 2011. <[repository.upnyk.ac.id/1405/1/RESUME\\_SKRIPSI.pdf](http://repository.upnyk.ac.id/1405/1/RESUME_SKRIPSI.pdf)>. [diakses 5 Desember 2012]